

KEMAJEMUKAN BUDAYA, DEMOKRASI, KOMUNIKASI, DAN INTEGRASI NASIONAL

Heddy Shri Ahimsa-Putra*)

Masalah integrasi nasional pun akhir-akhir ini kembali hangat diperbincangkan dan dipertanyakan. Orang pun bertanya-tanya tentang sebab-sebab dari konflik yang tak berkesudahan di Indonesia, sejak tahun-tahun terakhir pemerintahan Orde Baru (mulai sekitar tahun 1996), hingga sekarang. Apakah provokator pendukung rezim yang lama yang terus bekerja merongrong masyarakat kita? Atau memang sebenarnya masyarakat kita telah memendam benih-benih perselisihan tersebut sejak lama? Adakah yang salah dalam hubungan antarsuku, kelompok, agama dan golongan di negeri kita?

Tulisan ini tidak berupaya untuk menjawab semua persoalan tersebut di atas, karena itu semua berada di luar jangkauan sebuah makalah pendek. Di sini penulis mencoba membedah persoalan dari sudut pandang kemajemukan budaya dan implikasinya terhadap proses komunikasi dan pembentukan integrasi di negeri kita. Tidak diragukan lagi bahwa salah satu masalah yang kini banyak menjadi perhatian sekaligus keprihatinan kita adalah masalah integrasi nasional. Berbagai macam konflik yang tajam dan menyedihkan telah tampil di tengah kehidupan masyarakat kita. Kita

pun terkejut, karena tidak pernah sebelumnya menduga bahwa hal semacam itu akan terjadi di negeri kita. Beberapa pengamat bahkan mulai mengkhawatirkan akan terjadinya balkanisasi di Indonesia. Berbagai persoalan yang mungkin muncul perlu diperhatikan oleh berbagai pihak yang berurusan dengan soal politik atau kehidupan bernegara, seperti misalnya partai-partai politik. Tanpa perhatian dan kepekaan terhadap masalah-masalah tersebut, bukan integrasi nasional yang akan dicapai di masa mendatang, melainkan konflik yang

*) Heddy Shri Ahimsa-Putra, Dosen Antropologi Fakultas Sastra UGM.

semakin tajam dan semakin berlarut-larut, semakin ruwet dan sulit untuk diselesaikan.

Kemajemukan Budaya dan Sosial: antara Kebanggaan dan Keprihatinan

Salah satu hal yang sangat dibanggakan oleh banyak orang Indonesia adalah kemajemukan budaya yang dimiliki oleh Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan dan sebagai suatu bangsa. Dalam berbagai promosi kepariwisataan, misalnya keanekaragaman budaya inilah yang banyak ditonjolkan atau dipamerkan untuk menarik wisatawan mancanegara agar berkunjung ke Indonesia. Kebanggaan pada aneka ragam budaya ini sangat jelas tercermin dalam semboyan negara "Bhinneka Tunggal Ika" yang secara eksplisit mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang ada, tanpa harus mengorbankan kesatuan dan persatuan. Semboyan yang rasanya sudah begitu lama dan menjadi kebanggaan orang Indonesia, karena semboyan tersebut mencerminkan toleransi dan penghargaan pada perbedaan, kini diuji kembali kebenarannya, dan banyak orang Indonesia terkejut. Apa yang selama ini tampak begitu bagus dan membanggakan ternyata tidak bagus yang dibayangkan.

Bagi sebagian orang, keaneka-

ragaman ini ternyata telah membuat hidup mereka bertambah sengsara. Keanekaragaman telah berubah menjadi sesuatu yang memprihatinkan, dan tidak lagi membanggakan. Berbagai macam peristiwa menyedihkan, mulai dari peristiwa di Rengasdengklok, Tasikmalaya, Situbondo, Sanggaledo, Pekalongan, Jakarta, Solo, Banyuwangi, Ketapang, Kupang, Ambon hingga kini di Sambas, telah menyentak kita dari sebuah mimpi indah tentang persatuan, kesatuan, dan bhinneka tunggal ika. Bukan tidak mungkin berbagai macam pertanyaan akan muncul di benak anak-anak yang terpaksa mengungsi dari kampung mereka karena konflik antarsuku, antarpenganut agama, antarpengikut partai, mengapa kita harus berbeda? dan mengapa orang tidak boleh berbeda? mengapa yang satu harus menghancurkan yang lain?

Perbedaan pendapat tampaknya telah berubah dari rahmat menjadi laknat, karena kita tidak dapat menghargai perbedaan pendapat tersebut.

Mengapa perbedaan antar-golongan, suku, dan agama telah menimbulkan pertikaian di negeri kita? Ada banyak jawaban yang dapat diberikan. Namun jika kita memandangnya dari perspektif kebudayaan, maka kita dapat mengatakan bahwa

salah satu akar pertikaian tersebut adalah kemajemukan budaya, dan proses yang terjadi di Indonesia semenjak berkuasanya rezim Orde Baru.

Dari perspektif tertentu, kebudayaan seringkali diartikan oleh para ahli antropologi sebagai sistem pemaknaan yang disampaikan melalui simbol-simbol dalam kehidupan masyarakat, yang membimbing perilaku manusia dalam menghadapi lingkungannya (cf. Geertz, 1963). Oleh karena itu, kebudayaan mempunyai fungsi adaptif, yaitu untuk membuat manusia dapat bertahan dalam lingkungan tertentu tempat dia berada pada suatu waktu atau periode.

Kebudayaan ini sangat bervariasi dan berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lain, bahkan antara kelompok satu dengan yang lain dalam masyarakat yang sama. Perbedaan ini bisa sangat besar, bisa pula kecil, tergantung pada masing-masing kebudayaan. Semakin besar perbedaan kebudayaan tersebut, semakin besar pula potensi konflik yang terkandung di dalamnya.

Oleh karena itulah, kebhinnekaan budaya di Indonesia, selain memang pantas dibanggakan - selama masing-masing penduduknya masih dapat bersatu-pada dasarnya juga menyimpan sebuah potensi konflik yang sangat besar bilamana tidak dapat

ditangani dengan baik. Melihat kenyataan semacam ini dan potensi konflik yang terkandung di dalamnya, berbagai macam perbedaan yang ada, yang dapat menjadi salah satu sebab atau sumber terjadinya konflik, perlu ditangani secara hati-hati.

Sebagai perangkat pemaknaan, kebudayaan selalu digunakan oleh manusia dalam proses memahami segala sesuatu yang dihadapinya. Di sinilah sebenarnya terkandung potensi konflik di atas. Oleh karena masing-masing masyarakat, suku atau kelompok memiliki sistem pemaknaan yang berlain-lainan, maka dengan sendirinya tafsir yang mereka berikan pada kenyataan yang sama, atau yang sama-sama dihadapi, dapat berbeda-beda. Perbedaan ini dapat menjadi semakin besar ketika hubungan komunikasi antar-kelompok-kelompok ini jarang atau sulit dilakukan karena kendala bahasa, sehingga potensi konflik yang terbuka semakin bertambah besar.

Sebaliknya kecenderungan untuk menekankan perbedaan juga dapat menjadi semakin kuat manakala kelompok-kelompok yang semula berbeda makin sering mengalami kontak satu dengan yang lain dan menjadi semakin mirip satu sama lain, sehingga perbedaan juga tetap bertahan dan malah dapat semakin

dimantapkan.

Kerangka pemaknaan yang berbeda akan menghasilkan makna-makna yang berbeda pula walaupun diterapkan pada hal yang sama. Perbedaan tafsir atau pemaknaan ini dapat membawa kelompok-kelompok tertentu pada kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik fisik yang memakan korban jiwa. Di sinilah terletak problem praktis dari kemajemukan budaya, yakni bahwa kemajemukan budaya berarti kemajemukan tafsir atas kenyataan-kenyataan yang sama. Perbedaan tafsir ini juga dapat menyulut konflik fisik apabila salah satu tafsir dianggap sebagai tafsir yang lebih benar daripada tafsir yang lain, dan hal ini membawa akibat berupa dirugikannya salah satu pihak secara material.

Selain majemuk secara budaya, masyarakat Indonesia juga majemuk secara sosial, artinya ada berbagai macam golongan, lapisan, kelompok, kategori dan relasi sosial dalam masyarakat Indonesia yang turut menentukan atau mempengaruhi berbagai pola komunikasi yang ada di dalamnya. Relasi-relasi ini juga bervariasi, mulai dari relasi yang sangat positif, seperti hubungan perkawinan antargolongan dan kelompok hingga relasi yang sangat negatif seperti konflik fisik yang memakan korban jiwa.

Demokrasi dan Komunikasi Antarbudaya

Demokrasi sebagai sebuah konsep bukanlah konsep pribumi. Konsep ini berasal dari Barat. Tidak heran jika konsep ini sering jadi asing bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di pedesaan, di mana persoalan politik bukanlah persoalan yang sangat penting atau persoalan sehari-hari mereka. Oleh karena itu pula, pemaknaan terhadap konsep ini bisa sangat problematis. Bagi mereka yang telah menikmati pendidikan tinggi dan membaca surat kabar setiap hari, makna kata 'demokrasi' mungkin sudah cukup jelas. Namun bagi warga masyarakat lapisan bawah, yang belum tentu mengenyam pendidikan di tingkat perguruan tinggi, yang jarang mengenal kehidupan politik 'modern', makna kata tersebut tidak selalu jelas. Demikian juga halnya makna berbagai kata baru yang begitu populer di Indonesia, seperti reformasi, deregulasi, korupsi, kolusi, nepotisme, dan sebagainya. Di sinilah sebenarnya terletak salah satu persoalan pokok dari komunikasi antarbudaya di Indonesia.

Oleh karena makna yang diberikan oleh satu golongan, kelompok atau suku tertentu terhadap suatu fenomena belum

tentu sama dengan makna yang diberikan oleh golongan atau kelompok yang lain, maka kemungkinan untuk terjadinya salah paham menjadi cukup besar, dan potensi konflik pun menjadi besar pula.

Berkenaan dengan fenomena demokrasi kita pun dapat bertanya apakah tidak ada elemen-elemen demokrasi dalam kehidupan sosial politik masyarakat tradisional di Indonesia? Betulkah bahwa demokrasi yang kita pahami sekarang ini sama sekali asing, atautkah masih ada kesamaannya dengan elemen-elemen tertentu yang telah ada sebelumnya dalam kehidupan sosial politik masyarakat kita di masa lampau atau masyarakat tradisional kita di berbagai tempat di Indonesia?

Beberapa ahli antropologi yang membicarakan masalah ini beberapa tahun yang lalu sampai pada kesimpulan, bahwa demokrasi sebagai suatu bentuk atau sistem sosial politik ternyata tidak sama sekali berbeda dengan beberapa sistem sosial politik tradisional yang ada di Indonesia. Beberapa elemen tertentu dalam sistem sosial politik demokrasi yang berasal dari Barat, ternyata telah ada dalam masyarakat tradisional kita juga. Masalahnya kemudian adalah bagaimana kita harus 'menerjemahkan' berbagai elemen yang

sama, yang ada dalam sistem demokrasi Barat, ke dalam konteks lokal, sehingga apa yang semula asing akan tampak menjadi sesuatu yang biasa, yang sudah lama dikenal oleh masyarakat lokal. Di sinilah dibutuhkan seorang 'penerjemah' kebudayaan, atau perantara kebudayaan, yang mengetahui dengan baik berbagai kesamaan dan perbedaan antara budaya satu dengan yang lain, sehingga dia dapat membangun 'jembatan pengertian' yang akan membawa masyarakat pendukung berbagai kebudayaan sampai pada suatu 'pemahaman bersama yang sama' tentang berbagai macam hal dalam sistem sosial politik yang ada. Dan ini adalah persoalan komunikasi.

Pemahaman bersama yang dicapai melalui proses komunikasi antarberbagai pihak secara terus-menerus akan merupakan sebuah pemahaman yang bersifat demokratis, karena pemahaman ini tidak dipaksakan oleh satu pihak mana pun atas pihak yang lain. Solidaritas sosial yang lahir dari pemahaman semacam ini juga akan merupakan sebuah solidaritas yang kokoh karena didasarkan atas kesamaan pemahaman dan pemahaman.

Partai Politik, Komunikasi, dan Integrasi Nasional

Sehubungan dengan persoalan kemajemukan dan komunikasi di atas, kita telah melihat bagaimana kemajemukan ini tampak semakin meningkat setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Proses meningkatnya kemajemukan sosial-budaya sebenarnya mulai meningkat dengan cepat ketika pemerintah mengizinkan pihak swasta untuk membuka stasiun televisi sendiri dengan saluran masing-masing. Berbagai saluran baru inilah yang kemudian memungkinkan membanjirnya informasi ke dalam rumah-rumah penduduk di Indonesia, mulai dari rumah gedongan di kawasan elite, hingga gubuk dengan atap rumbia di pelosok-pelosok yang terpencil.

Aneka-ragam informasi yang dipahami melalui kerangka budaya yang majemuk menghasilkan mosaik pemaknaan yang semakin majemuk pula, walaupun pada saat yang sama, benang-benang pengertian bersama juga mulai terjalin lewat berbagai macam simbol yang ditampilkan di televisi. Namun benang-benang pengertian ini masih terlalu rapuh untuk menjadi tempat berpijak bagi upaya membangun sebuah gedung kebangsaan yang kokoh.

Dalam situasi semacam ini,

berbagai macam partai politik baru yang bermunculan di Indonesia, yang kemunculannya telah membuat kompleksitas masyarakat Indonesia semakin meningkat, memiliki tanggung jawab untuk dapat membuat benang pengertian yang telah dirajut bersama menjadi jembatan pengertian bersama yang lebih mampu menopang bangunan kebangsaan yang akan dibangun di atasnya. Tanpa upaya membangun pengertian bersama yang lebih kokoh, munculnya berbagai partai politik baru akan semakin menipiskan jalinan pengertian bersama yang telah ada, dan ini dapat mengancam integrasi nasional.

Di sinilah dibutuhkan orang-orang yang mampu melihat berbagai macam persamaan dan perbedaan pemaknaan yang ada pada berbagai segmen masyarakat Indonesia, kemudian mampu memanfaatkan persamaan tersebut untuk memperkokoh jalinan pengertian bersama yang telah ada, serta memperkecil ruang perbedaan yang memungkinkan timbulnya berbagai perselisihan dan konflik dalam masyarakat Indonesia. Mereka inilah yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjadi *Public Relations* kebudayaan dan politik berbagai partai politik yang ada sekarang.

Singkatnya, dengan makin

kompleksnya kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia sekarang ini, karena lahirnya berbagai partai politik baru, masyarakat Indonesia semakin membutuhkan individu-individu yang mampu membangun jembatan pengertian bersama antar-berbagai kawasan pemaknaan, sehingga dapat tercipta sebuah arena sosial-politik bersama yang memberi ruang gerak yang leluasa pada berbagai bentuk pemaknaan untuk turut bermain di dalamnya. Di sinilah partai-partai politik membutuhkan PR-PR yang memiliki sifat-sifat berikut:

1. Peka dan mampu memahami budaya-budaya lokal di Indonesia dengan baik, atau yang *culturally sensitive*. Ini penting bagi setiap upaya menyampaikan ide-ide baru ke dalam masyarakat, yang sangat mungkin akan dipahami secara salah bilamana tidak disampaikan secara tepat.
2. Mampu menerjemahkan isu nasional ke lokal, atau sebaliknya. Ini penting bagi partai-partai politik yang ingin memperoleh dukungan secara luas di tingkat lokal dan nasional. Berbagai isu mungkin memang menarik dan relevan secara nasional, tetapi mungkin sangat jauh dari isu lokal atau tidak relevan sama sekali. Di sini penerjemahan isu nasional ke tingkat lokal dan sebaliknya

akan dapat membuat isu yang dikemukakan relevan di dua tingkat tersebut.

3. Memperhatikan dan memeningkatkan integrasi nasional. Berbagai isu dapat menjadi sumber konflik yang mengancam integrasi nasional bilamana ditafsirkan dengan cara tertentu. Untuk memperkecil ruang timbulnya disintegrasi ini, diperlukan PR atau mungkin lebih tepat 'pialang kebudayaan' yang selain memiliki kemampuan di atas juga mementingkan kelestarian integrasi nasional yang telah susah payah dibangun selama ini.

Penutup

Dalam tulisan ini penulis telah mencoba mengungkap beberapa persoalan penting yang dapat menghadang upaya kita mencapai integrasi nasional yang lebih kokoh di masa-masa mendatang, dan upaya apa saja yang dapat kita tempuh guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Beberapa butir persoalan yang telah dibicarakan antara lain adalah:

1. Bahwa masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat yang majemuk secara sosial dan budaya. Kemajemukan ini bisa merupakan berkah, bisa pula merupakan musibah, tergantung bagaimana cara kita menanganinya. Kemaje-

- mukan ini paling tidak mengandung benih perselisihan dan pertikaian yang cukup besar karena di dalamnya terkandung potensi kesalah-pahaman.
2. Kemajemukan ini akan semakin besar di masa-masa mendatang, seiring dengan makin lancarnya komunikasi antarberbagai kelompok dan golongan serta makin banyaknya golongan, kelompok, lapisan, dan partai-partai baru yang muncul di tengah masyarakat kita. Makin kompleksnya masyarakat dan budaya kita juga akan membawa masalah-masalah baru.
 3. Kesalah-pahaman sangat mungkin terjadi, karena dalam kemajemukan tersebut terdapat kemajemukan pemaknaan dan pemahaman, baik mengenai hal yang sama ataupun berbeda. Potensi konflik semacam ini akan membesar manakala perbedaan pemaknaan menjadi semakin besar, dan terjadi pemaksaan pemaknaan dari satu pihak atas pihak yang lain.
 4. Untuk mengurangi potensi konflik ini maka perlu dilakukan dialog, komunikasi, yang terus-menerus antarberbagai pihak, sehingga akan dapat tercapai suatu pemaknaan yang kurang lebih sama atas hal-hal yang penting dalam kehidupan sosial-politik lewat proses yang sedikit banyak bersifat demokratis.
 5. Komunikasi akan berjalan lancar bilamana ada pihak-pihak yang mampu membangun 'jembatan pengertian' untuk menghubungkan aneka-ragam pemaknaan yang ada dalam masyarakat serta membangun sebuah 'panggung pengertian bersama' yang dapat menjadi arena tempat semua pihak turut bermain menciptakan budaya baru yang lebih demokratis.
 6. Adalah salah satu tugas dari *public relations* untuk membangun 'jembatan pengertian' agar kita semua dapat turut bermain sandiwara di atas 'panggung pengertian bersama'. Di sinilah dibutuhkan *public relations* yang peka terhadap nuansa budaya lokal di kawasan nusantara, yang begitu bervariasi; dibutuhkan *public relations* yang memahami kondisi sosiologis, antropologis dan psikologis berbagai macam masyarakat tradisional dan suku bangsa di Indonesia.
 7. Dengan 'jembatan pengertian' serta 'panggung pengertian bersama' yang kokoh dan dibangun secara demokratis, maka integrasi nasional yang diidamkan akan dapat dicapai dengan lebih cepat dan mudah. Mudah-mudahan demikian.